



**FOREST GOVERNANCE, MARKETS AND TRADE:**

**IMPLICATIONS FOR SUSTAINABILITY AND LIVELIHOODS**

**AMANDEMEN TERHADAP UNDANG-  
UNDANG U.S. LACEY ACT:**

**IMPLIKASI ATAS PARA EKSPORTIR  
HASIL HUTAN INDONESIA**

---

**R. JUGE GREGG  
AMELIA PORGES**



# **AMANDEMEN TERHADAP UNDANG-UNDANG U.S.LACEY ACT: IMPLIKASI ATAS PARA EKSPORTIR HASIL HUTAN INDONESIA**

*R. Juge Gregg & Amelia Porges*

Oktober 2008

Versi publikasi ini yang berkaitan dengan pasar Vietnam dan Cina, dalam bahasa Inggris, China, dan Vietnam, tersedia di: [www.forest-trends.org](http://www.forest-trends.org). Dokumen ini diterjemahkan oleh EC-Indonesia FLEGT Support Project, program bantuan teknis Uni Eropa untuk Indonesia dalam hal penegakan hukum, tata kelola dan perdagangan bidang kehutanan.

Amandemen terhadap UU *U.S Lacey Act*: Implikasi terhadap para Eksportir Hasil Hutan Indonesia  
© 2008 Forest Trends and Sidley Austin LLP  
Foto sampul oleh Todu Manurung

## LEMBAGA-LEMBAGA YANG BEKERJA SAMA

**Sidley Austin LLP** (<http://www.sidley.com>): Sidley adalah sebuah kantor hukum global, dengan lebih dari 1800 pengacara di 16 kantor, yang memberikan nasihat hukum kepada para klien mengenai masalah lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan selama puluhan tahun. Pekerjaan ini mencakup uji tuntas dalam transaksi-transaksi perusahaan multi-nasional, pemberian nasihat hukum kepada berbagai perusahaan mengenai dampak-dampak dan persyaratan-persyaratan lingkungan hidup terkait dengan menjalankan bisnis di Amerika Serikat, Cina, Eropa, Amerika Selatan dan Asia, dan membantu para klien sehubungan dengan desain dan pelaksanaan sistem-sistem pengelolaan lingkungan hidup, termasuk yang didasarkan atas ISO 14001. Sidley juga memberi nasihat hukum (legal advise) kepada para klien mengenai berbagai macam hal yang berkaitan dengan perubahan iklim maupun termasuk perdagangan karbon, konsekuensi-konsekuensi perdagangan internasional dari berbagai rejim peraturan, dan proyek-proyek energi alternatif, serta mewakili para klien dalam proses pengadilan yang berkaitan dengan perubahan iklim. Pengalaman Sidley bahkan juga meliputi hal-hal yang terkait dengan pengelolaan rantai pasokan dan pengurusan produk global, termasuk pembatasan terhadap muatan produk, pengemasan dan pemberian label (mis, persyaratan-persyaratan REACH, ROHS/WEEE and ELV yang ditetapkan oleh UE). Sidley memberi nasihat hukum kepada para klien mengenai penataan berbagai macam perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup, termasuk Konvensi Basel mengenai perpindahan antar negara mengenai bahan berbahaya dan beracun (B3), Protokol Montreal mengenai CFC, Protokol Stockholm mengenai bahan pencemar organik yang terus bertahan (POP) maupun Konvensi Perdagangan Internasional terkait tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

R. Juge Gregg, Washington, DC, [rjgregg@sidley.com](mailto:rjgregg@sidley.com) (peraturan lingkungan hidup dan kehutanan)

Brenda Jacobs, Washington, DC, [bjacobs@sidley.com](mailto:bjacobs@sidley.com) (penegakan UU bea cukai dan masalah perencanaan usaha)

Amelia Porges, Washington, DC, [aporges@sidley.com](mailto:aporges@sidley.com) (masalah perdagangan)

Henry Ding, Beijing, [hding@sidley.com](mailto:hding@sidley.com),

Tim Li, Hong Kong, [htli@sidley.com](mailto:htli@sidley.com)

Tang Zhengyu, Shanghai, [zytang@sidley.com](mailto:zytang@sidley.com),

William O. Fifield, Hong Kong, [wfifield@sidley.com](mailto:wfifield@sidley.com)

**Forest Trends** (<http://www.forest-trends.org>): *Forest Trends* adalah sebuah organisasi nirlaba yang mendorong untuk kehutanan berkelanjutan dan kontribusi hutan untuk kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia. Organisasi ini bertujuan untuk memperluas fokus kehutanan di luar urusan kayu dan mendorong pasar jasa lingkungan yang disediakan oleh hutan seperti perlindungan daerah aliran sungai (DAS), keanekaragaman hayati dan cadangan karbon. *Forest Trends* menganalisis strategi pasar dan isu-isu kebijakan, mendorong hubungan antara produsen, masyarakat dan investor dan mengembangkan instrumen-instrumen keuangan baru untuk membantu pasar bekerja demi konservasi dan masyarakat. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1999 oleh sebuah jaringan internasional yang terdiri dari para pemimpin industri kehutanan, aktivis LSM lingkungan hidup dan lembaga-lembaga investasi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi

Kerstin Canby, [kcanby@forest-trends.org](mailto:kcanby@forest-trends.org)

Jordan Sauer, [jsauer@forest-trends.org](mailto:jsauer@forest-trends.org)

*Artikel ini hanya diperuntukkan sebatas informasi dan tidak dimaksudkan sebagai opini hukum. Informasi ini juga bukan merupakan sebagai bagian dari hubungan antara penasehat hukum dengan klien. Para pembaca sebaiknya tidak bertindak berdasarkan informasi ini kecuali dengan bantuan penasehat hukum profesional.*

## **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>IMPLIKASI TERHADAP EKSPOR INDONESIA KE AMERIKA SERIKAT ....</b>	<b>1</b>
<b>SEKILAS TENTANG UNDANG-UNDANG U.S LACEY ACT .....</b>	<b>2</b>
<b>LANGKAH-LANGKAH LEBIH LANJUT YANG HARUS DILAKUKAN PEMERINTAH A.S. ....</b>	<b>3</b>
<b>MENGHINDARI PENUNTUTAN BERDASARKAN LACEY ACT .....</b>	<b>4</b>
<b>PELANGGARAN TERHADAP LACEY ACT .....</b>	<b>5</b>
<b>SANKSI BERDASARKAN LACEY ACT .....</b>	<b>5</b>
<b>INFORMASI LEBIH LANJUT MENGENAI LACEY ACT .....</b>	<b>7</b>

## KATA PENGANTAR

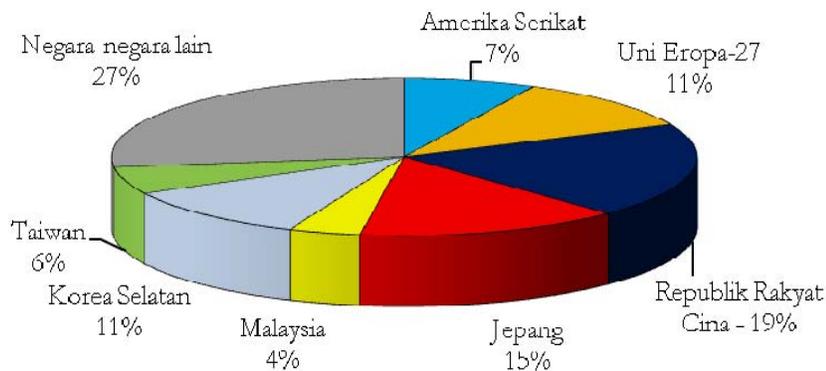
Sebuah peraturan baru yang menjadi dasar bagi pemerintah A.S dalam menjatuhkan sanksi denda, dan bahkan kurungan penjara, baik terhadap orang maupun perusahaan yang melakukan perdagangan kayu ilegal lintas negara. Pemerintah A.S bahkan dapat menerapkan UU ini, yang disebut Lacey Act, untuk menjatuhkan hukuman yang signifikan terhadap orang dan perusahaan yang mungkin tidak menyadari bahwa kayu mereka pada dasarnya melanggar ketentuan yang ada. Peraturan baru ini, dan berbagai persyaratan baru menyangkut impor, akan dikenakan terhadap para produsen dan eksportir yang mengirim berbagai macam produk yang terbuat dari kayu ke Amerika Serikat, termasuk kertas, perabot, kayu bangunan, bahan penutup lantai, kayu lapis atau bahkan bingkai gambar.

Departemen Kehakiman A.S. telah menegaskan bahwa mereka akan menerapkan Undang-Undang ini untuk menuntut siapapun yang mengimpor kayu yang diambil atau diangkut dengan cara yang melanggar hukum negara asal kayu. Sanksi berdasarkan Undang-undang ini meliputi sanksi administratif, penyitaan atas barang-barang yang diperjualbelikan secara ilegal maupun hukuman penjara. Pelanggaran terhadap Lacey Act juga dapat mengarah pada tuntutan penyelundupan atau pencucian uang. Lacey Act berlaku terhadap setiap produk dan jenis kayu yang diimpor, bahkan terhadap jenis yang tidak termasuk di dalam jenis satwa yang terancam punah yang ada dalam daftar pada Konvensi Internasional mengenai Perdagangan Jenis Hewan atau Tanaman yang Terancam Punah (CITES).

## IMPLIKASI TERHADAP EKSPOR INDONESIA KE AMERIKA SERIKAT

Indonesia merupakan produsen dan pemasok hasil hutan yang besar untuk pasar A.S dan tercatat memiliki masalah dengan pembalakan liar. Pada tahun 2007, Indonesia mengekspor 7% dari total ekspor produk kayunya secara langsung ke Amerika Serikat – terutama perabot, kayu lapis dan kertas – dengan volume sekitar 3 juta m3 RWE yang nilainya mencapai \$1,2 milyar.

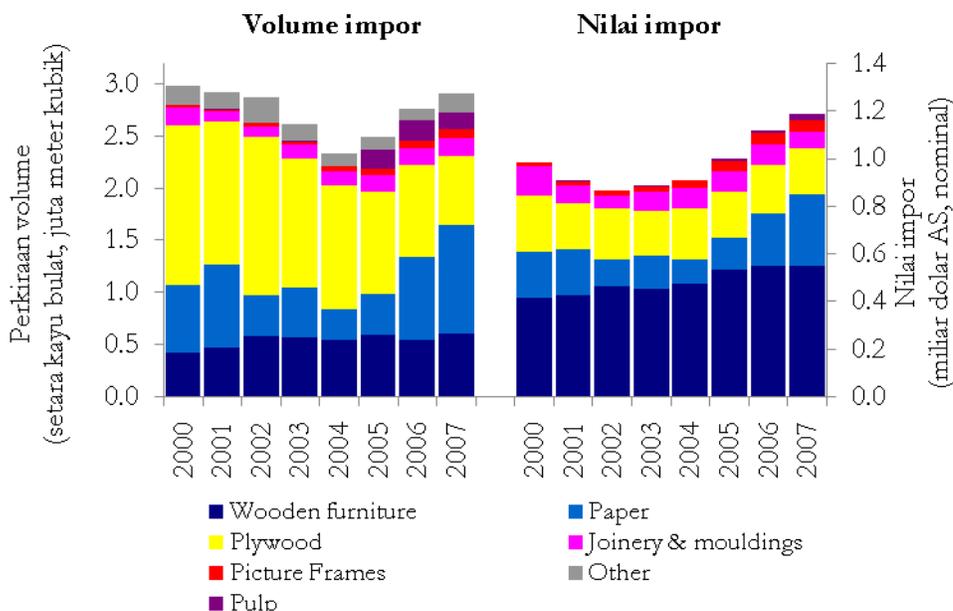
**Gambar 1: Ekspor Hasil Hutan Indonesia, 2007, berdasarkan prosentase**



*Sumber: Data Perdagangan US ITC, Eurostat, Statistik Perdagangan Jepang, Pelayanan Bea Cukai Korea, Direktorat Jenderal Bea Cukai Taiwan, data bea cukai Cina dan UN Comtrade, sebagaimana dibimpun oleh James Hewitt*

Angka ini dapat saja lebih besar, apabila ekspor tidak langsung melalui Cina, Malaysia atau Vietnam juga diperhitungkan, mengingat banyak produk kayu Indonesia terlebih dahulu dikirim ke tempat-tempat pengolahan kayu di beberapa negara tersebut, sebelum dikirim ke Amerika Serikat. A.S merupakan salah satu pangsa pasar Indonesia yang paling pesat pertumbuhannya – apabila dilihat dari nilai per meter kubik.

**Gambar 2: Impor AS secara langsung atas Hasil Hutan Indonesia, tahun 2000-2007, menurut Volume dan Nilai**



Sumber: Data US ITC Trade 90, disusun oleh James Hewitt

Terdapat kemungkinan beberapa produk kayu Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat merupakan hasil pembalakan ilegal dan bermasalah dengan aturan-aturan hukum lainnya sebagaimana diatur di dalam Lacey Act yang dapat menimbulkan resiko bagi produsen, eksportir dan pengecer barang-barang yang diduga berasal dari kayu Indonesia dengan resiko disita, penjatuhan sanksi maupun hukuman penjara berdasarkan UU A.S yang baru diamandemen ini.

## SEKILAS TENTANG UNDANG-UNDANG U.S LACEY ACT

**Pengaturan atas Kayu Impor yang diterapkan di Pengadilan A.S:** *Lacey Act* memperluas cakupan atas hukum dan pengaturan atas kayu impor dengan menetapkan bahwa tindakan memperjualbelikan produk-produk yang terbuat dari kayu yang ditebang, diangkut atau dijual dengan cara yang melanggar peraturan negara asal –seperti pelanggaran atas peraturan pengelolaan hutan yang berlaku di negara-negara produsen seperti Rusia, Indonesia, Gabon atau Peru adalah pelanggaran atas Hukum Amerika Serikat. Penjelasan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran menurut *Lacey Act* dijelaskan di bawah ini.

**Sanksi:** Cara untuk mencegah atau meminimalkan hukuman menurut *Lacey Act* adalah dengan melakukan uji tuntas terhadap asal dan sumber kayu. Pemerintah A.S dapat menggunakan UU ini untuk pemberian sanksi atas orang dan perusahaan, terlepas dari apakah mereka mengetahui atau tidak mengetahui semua hal yang berkaitan ketidakabsahan sumber perolehan kayu tersebut. Sudah barang tentu, ada kemungkinan pemberian sanksi yang signifikan atau hukuman penjara akan lebih berat kemungkinannya apabila seseorang tersebut mengetahui— atau seharusnya telah mengetahui – tentang ketidakabsahan kayu. Informasi lebih lanjut mengenai jenis dan besarnya hukuman yang mungkin dijatuhkan dan bagaimana kaitannya dengan pengetahuan tentang ilegalitas adakah sebagai berikut.

**Persyaratan Baru Pernyataan (kepabeanan) Impor Untuk Produk Kayu:** Kongres juga menambahkan syarat-syarat baru Pernyataan Impor yang menekankan pentingnya informasi tentang asal kayu. Walaupun UU tersebut menyatakan persyaratan ini baru berlaku pada akhir tahun 2008, Pemerintah A.S sekaligus menyatakan bahwa ketentuan tersebut belum akan diterapkan sampai musim semi 2009. Pemerintah AS akan menerbitkan pembaharuan data mengenai tahapan dan langkah-langkah persyaratan pernyataan impor. Apabila syarat-syarat ini mulai berlaku, para importir diwajibkan untuk menyatakan nama-nama ilmiah setiap kayu pada produk yang dimaksud, nilai impor dan jumlah produk kayu, serta nama negara atau negara-negara tempat kayu tersebut berasal. Importir perlu mendapatkan informasi tersebut dari para pemasok mereka, dan para pemasok perlu terus memantau serta memperbaharui informasi ini secara berkala. UU ini membolehkan para eksportir untuk mencantumkan beberapa kemungkinan negara asal dan/atau jenis kayu, apabila informasi tersebut belum diketahui. Pengiriman produk kayu yang tidak disertai dengan laporan pernyataan (kepabeanan) yang diwajibkan pada saat masuk ke Amerika Serikat akan dianggap tidak dapat diterima.

## **LANGKAH-LANGKAH LEBIH LANJUT YANG HARUS DILAKUKAN PEMERINTAH A.S.**

Larangan Lacey Act untuk mengimpor produk kayu yang dibalak secara ilegal telah diterapkan dimana Departemen Kehakiman dapat mengadili orang yang melanggar larangan tersebut. Akan tetapi, pemerintah A.S akan menerbitkan peraturan atau pedoman menjelang akhir 2008 dan awal 2009 untuk mengklarifikasi syarat-syarat laporan pernyataan impor kepabeanan.

Pemerintah A.S dapat menggunakan Lacey Act baru ini untuk menerapkan penegakan hukum yang serius dalam waktu dekat dengan maksud memberikan peringatan kepada para eksportir asing. Bahkan sebelum Lacey Act diamendemen, pemerintah A.S telah membidik (mencincar) perdagangan ilegal perabot yang terbuat dari jenis pohon yang terancam punah. Pada tanggal 16 April 2008, Dewan Juri Federal Newark, New Jersey, telah mendakwa seorang pengrajin perabot Cina dengan menggunakan UU tentang Tumbuhan dan Satwa Liar and UU Anti-penyelundupan, karena mengimpor sebuah kontainer yang memuat tempat tidur bayi yang terbuat dari kayu ramin, jenis pohon yang terancam punah yang terdapat dalam daftar CITES. Barang-barang tersebut kemudian disita dan yang bersangkutan serta perusahaannya menghadapi ancaman penjara dan denda ratusan ribu dollar. Lacey Act memungkinkan pemerintah A.S untuk juga melakukan tuntutan serupa terhadap siapapun yang membawa dan memperjualbelikan jenis-jenis kayu yang tidak terancam punah (jenis yang tidak termasuk dalam daftar CITES).

## MENGHINDARI PENUNTUTAN BERDASARKAN LACEY ACT

Untuk menghindari munculnya masalah terkait dengan ketentuan-ketentuan baru yang di dalam Lacey Act, terdapat langkah-langkah yang rasional atau jelas yang dapat diikuti oleh para eksportir dan importir produk kayu.

- **Perhatikan Rekanan Bisnis Anda** – Rekanan bisnis akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang semakin rinci tentang sumber perolehan kayu. Produsen dan eksportir/importir akan dapat menarik rekanan-rekanan bisnis baru – atau kehilangan rekanan bisnis – yang bergantung pada sejauhmana mereka dapat menjamin keabsahan kayu mereka.
- **Pahami Sumber Asal Kayu** – Produsen dan eksportir/importir perlu menyiapkan proses pengelolaan yang dirancang untuk menyelidiki rantai pasokan produk dan menyediakan jaminan yang terdokumentasi agar produk kayu yang mungkin ilegal tidak akan diterima ataupun digunakan. Perusahaan dan karyawan perusahaan yang mengabaikan masalah sumber perolehan kayu akan dimintakan pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran *Lacey Act*.
- **Jangan bergantung pada “dokumen” sebagai jaminan** – Sejumlah ketentuan dalam *Lacey Act* akan berlaku walaupun suatu perusahaan tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya tentang ketidakabsahan mengenai bahan baku dari suatu produk. Oleh karena itu tidak cukup sekadar adanya surat atau kontrak dari pemasok anda yang menyatakan bahwa produk kayu tersebut diperoleh secara legal. Walaupun membantu, dokumen tersebut tidak akan menghalangi disitanya produk kayu apabila pemerintah mempunyai cukup alasan untuk meyakini bahwa kayu tersebut diperoleh secara ilegal.
- **Jangan bergantung semata-mata pada sertifikat keabsahan atau keberlanjutan** – Sebuah sertifikat keabsahan (legalitas) atau keberlanjutan kayu, walaupun membantu, tidak menyebabkan munculnya kekebalan hukum. Jika Pemerintah A.S mempunyai alasan yang cukup untuk meyakini bahwa kayu tersebut diperoleh secara ilegal, mereka dapat melakukan tindakan penegakan hukum, tidak soal apakah produk tersebut disertai dengan sertifikat demikian atau tidak.
- **Siapkan struktur kontrak untuk melindungi kepentingan keuangan Anda** – Importir produk kayu atau kertas dapat membuat struktur kontrak sedemikian rupa agar mereka membayar dan memiliki produk hanya setelah mendapat izin keluar dari Bea Cukai. Demikian pula, terhadap perusahaan pembuat kertas atau produk kayu dapat menyusun kontrak dengan kesepakatan pemberian ganti rugi dari pemasok kayu atas setiap kerugian keuangan yang diakibatkan oleh tindakan pemerintah A.S terhadap suatu produk.
- **Cermati setiap peraturan yang berlaku** – Pemerintah A.S akan menerbitkan peraturan atau pedoman menjelang akhir 2008 dan awal 2009 yang akan memberikan informasi tambahan mengenai syarat-syarat laporan impor kepabeanan dan ketentuan-ketentuan terkait lainnya. Perusahaan perlu mengetahui peraturan dan ketentuan apa saja yang mungkin terdapat di dalam peraturan-peraturan tersebut dan apa implikasinya bagi usaha mereka.

## PELANGGARAN TERHADAP LACEY ACT

Dakwaan berdasarkan *Lacey Act* mensyaratkan dua pembuktian atas pelanggaran, yaitu pelanggaran “yang tidak mudah terlihat” dan pelanggaran “yang mudah terlihat”. Pelanggaran “yang tidak mudah terlihat” bisa jadi merupakan pelanggaran terhadap peraturan negara asal atau yang berlaku di A.S mengenai pengambilan, kepemilikan, impor, ekspor, pengangkutan, atau perdagangan ikan atau flora dan fauna alam atau tanaman tertentu. Pelanggaran “yang mudah terlihat” mencakup pelanggaran terhadap larangan UU *Lacey Act* atas impor, ekspor, pengangkutan, perdagangan, pengambil-alihan atau pembelian barang-barang yang ilegal. Penuntutan hukum bahkan dapat dilakukan 5 tahun setelah terjadinya pelanggaran terhadap *Lacey Act*.

Amendemen UU *Lacey Act* menjelaskan daftar keseluruhan kegiatan-kegiatan ilegal yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran “yang tidak mudah terlihat” terhadap peraturan tersebut. Daftar tersebut meliputi hal-hal yang dianggap melanggar ketentuan yang mudah dipahami seperti pemungutan kayu ilegal dari taman nasional. Akan tetapi, *Lacey Act* dapat juga mencakup kegiatan-kegiatan yang tidak dapat terlihat dengan jelas, seperti pengangkutan kayu pada malam hari yang melanggar ketentuan larangan jual-beli kayu ilegal. Berdasarkan Amendemen *Lacey Act*, pelanggaran “yang tidak mudah terlihat” mencakup pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang secara umum bertujuan “melindungi tanaman,” atau ketentuan yang mengatur tentang:

- (I) pencurian tanaman;
- (II) pengambilan tanaman dari taman nasional, cagar alam, atau kawasan lain yang telah ditetapkan untuk dilindungi/dikonservasi;
- (III) pengambilan tanaman dari suatu kawasan yang memiliki peruntukan khusus; atau
- (IV) pengambilan tanaman tanpa, atau bertentangan dengan, ketentuan adanya izin dari otoritas yang berwenang.

Di samping itu, kategori pelanggaran “yang tidak mudah terlihat” juga mencakup ketidakmampuan dalam membayar royalti, pajak, atau biaya nilai tegakan kayu sebagaimana ketentuan yang berlaku serta pelanggaran terhadap ketentuan ekspor atau pemindahan tanaman dari satu kapal ke kapal lain.

## SANKSI BERDASARKAN LACEY ACT

Sanksi terhadap pelanggaran perdagangan ilegal lintas negara menurut *Lacey Act* akan bergantung pada pengetahuan terdakwa mengenai pelanggaran yang tidak mudah terlihat terhadap peraturan negara asal.

Sanksi administratif: Pemerintah dapat mengenakan sanksi administratif yang signifikan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap *Lacey Act*. Bila terdakwa ternyata mengetahui, atau saat melakukan transaksi seharusnya bertindak hati-hati, seharusnya mengetahui bahwa ikan atau flora dan fauna atau suatu tanaman yang diambil, dimiliki, diangkut atau dijual telah melanggar ketentuan yang tidak mudah terlihat, maka pemerintah AS menjatuhkan hukuman administratif berupa denda sampai dengan \$10,000. Misalnya, Badan Kelautan dan Atmosfir Nasional (*NOAA*) yang secara reguler dapat membuktikan telah terjadinya tindakan kurang “kehati-hatian yang sepatutnya” yang dilakukan oleh importir ikan dengan menunjukkan bahwa penanggungjawab berada dalam usaha penangkapan ikan komersial tersebut.

Otoritas hukum setempat dapat mengeluarkan pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran dan menerapkan sanksi administratif. Bila terdakwa berkeberatan terhadap sanksi tersebut, maka instansi sebaliknya harus menunjukkan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan terdakwa kepada hakim pengadilan administratif, dengan sejumlah fakta yang lebih kuat untuk menunjukkan telah terjadinya pelanggaran hukum.

Penyitaan: Ikan atau flora dan fauna atau tanaman yang diimpor dengan melanggar *Lacey Act* dapat dikenai penyitaan sekalipun terdakwa tidak mengetahui mengenai pelanggaran yang tidak mudah terlihat (mis., bahwa kayu tersebut dipungut secara ilegal). Walaupun undang-undang pidana A.S secara umum telah mengatur tentang prinsip “pembelaan pemilik yang tidak bersalah” terhadap penyitaan, maka pembelaan tersebut tidak berlaku apabila milik yang harus disita merupakan “barang gelap atau barang lain yang ilegal untuk dimiliki,” yang termasuk ke dalam barang-barang yang dilarang untuk dimiliki berdasarkan *Lacey Act*. (*Lihat kasus U.S versus 144,774 Pounds Of Blue King Crab*, 410 F. 3d. 1131 (9th Cir., 2005). Kapal, kendaraan, pesawat terbang atau perlengkapan lain yang digunakan dalam suatu tindak pidana berat berdasarkan *Lacey Act* (lihat di bawah) juga dapat dikenai penyitaan setelah adanya proses pembuktian bersalah melakukan tindak pidana berat, apabila pemilik telah mengetahui, atau pada waktu menjalankan kehati-hatian yang sepatutnya telah mengetahui bahwa barang tersebut akan digunakan dengan cara tersebut. Peraturan UU bea cukai mengenai penyitaan berlaku bagi semua prosedur penyitaan.

Denda dan hukuman penjara: Bila ada pihak dengan sadar ikut melakukan jual beli barang ilegal, padahal mengetahui bahwa ikan atau flora dan fauna alam atau tanaman tersebut telah diambil, dimiliki, diangkut atau dijual dengan melanggar “ketentuan yang tidak mudah terlihat”, maka pihak tersebut dapat dituntut telah melakukan tindak pidana berat, dan dapat dikenai hukuman denda sampai \$250,000 (\$500,000 untuk organisasi) dan/atau hukuman penjara sampai dengan 5 (lima) tahun. *Lihat United States versus Eisenberg*, 496 F Supp 2d 578, 582. (ED Pa 2007) (yang menyatakan bahwa pada waktu Kongres mengundangkan 18 U.S.C. § 3571 pada tahun 1984 (dan menambahkan 3571(e) pada tahun 1987), dimana Kongres telah membatalkan denda-denda yang lebih rendah dalam *Lacey Act*. Apabila pihak tersebut pada waktu menjalankan kehati-hatian yang sepatutnya telah mengetahui mengenai pelanggaran “yang tidak mudah terlihat”, maka pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana ringan yang dendanya mencapai \$100,000 (\$200,000 untuk organisasi) dan/atau hukuman penjara sampai 1 (satu) tahun. Setiap pelanggaran merupakan tindak kejahatan terpisah.

Penyelundupan dan pencucian uang: Importir yang memasukkan barang ke AS dengan melanggar *Lacey Act* juga dapat dituntut berdasarkan undang-undang penyelundupan, sebagaimana ketentuan di dalam Artikel 18 USC §545, yang dikategorikan sebagai tindak pidana berat Kelas D. Tuduhan atas penyelundupan, juga dapat memperkuat tuduhan telah dilakukannya pencucian uang karena tindakan mentransfer uang dari Amerika Serikat ke penjual asing “dengan niat untuk mendukung dilakukannya suatu kegiatan melawan hukum tertentu,” karena penyelundupan termasuk perbuatan melawan hukum, karena penyeludupan masuk kategori kejahatan berat. *Lihat U.S v. Lee*, 937 F.2d. 1388 (9th Cir., 1991). Pada akhirnya, syarat-syarat laporan pernyataan kepacean yang terdapat di dalam UU baru tersebut bisa mendorong penjatuhan hukuman atas pernyataan palsu sebagai kejahatan berat, sebagaimana diatur Artikel 18 USC §1001, yang menyebutkan bahwa “ seseorang yang dengan sadar dan dengan sengaja membuat pernyataan palsu yang serius, membuat atau menggunakan dokumen-dokumen palsu, atau menyembunyikan fakta-fakta penting, dapat dikenai denda dan/atau dijatuhi hukuman penjara sampai 5 tahun.

## **INFORMASI LEBIH LANJUT MENGENAI LACEY ACT**

Departemen Kehakiman A.S: [www.usdoj.gov](http://www.usdoj.gov)

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (EIA): [www.eia-global.org](http://www.eia-global.org)

Juga tersedia di Situsweb *Forest Trends*: [www.forest-trends.org](http://www.forest-trends.org)

- Amendemen terhadap UU *U.S Lacey Act*: Implikasi atas para Eksportir Hasil Hutan Cina (bahasa Cina dan Inggris)
- Amendemen terhadap UU *U.S Lacey Act*: Implikasi atas para Eksportir Hasil Hutan Vietnam (bahasa Inggris dan Vietnam)